

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam sebuah perusahaan, pendanaan sangat diperlukan guna mengelola dan mengembangkan bisnis yang ada serta melancarkan kegiatan operasional perusahaan. Terdapat dua sumber pendanaan yaitu internal dan eksternal (Nisa & Wulandari, 2021). Dana internal, yang berasal dari saldo pendapatan perusahaan, merupakan salah satu sumber pendanaan. Sedangkan dana eksternal berasal dari sumber di luar bisnis, seperti utang. Perusahaan yang memiliki utang akan dikenakan tingkat pengembalian yang harus diserahkan kepada kreditor, yang dikenal sebagai bunga.

**Tabel 1.1 Perbandingan Kredit sesuai Sektor Ekonomi**  
**Posisi Kredit Modal Kerja Perbankan Berdasarkan Sektor Ekonomi**  
**(Milyar Rupiah)**

Sektor Ekonomi	2021	2022	2023
Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha	2.486.694	2.756.725	2.996.471
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	185.158	218.774	242.407
Pertambangan dan Penggalian	66.257	89.608	109.803
Industri Pengolahan	637.343	713.879	737.688

**Posisi Kredit Modal Kerja Perbankan Berdasarkan Sektor Ekonomi**  
(Milyar Rupiah)

Sektor Ekonomi	2021	2022	2023
Pengadaan Listrik dan Gas	18.733	18.578	19.203
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.312	2.206	4.569
Konstruksi	227.858	227.863	245.387
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	821.900	883.885	924.541
Transportasi dan Pergudangan	55.065	56.334	56.128
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	38.556	43.579	45.509
Informasi dan Komunikasi	53.819	62.348	69.225
Jasa Keuangan dan Asuransi	198.704	241.962	309.934
Real Estate	64.665	67.749	76.400
Jasa Perusahaan	41.200	44.301	54.553
Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha (Konsumsi Rumah Tangga)	391	544	801

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Merujuk kepada data yang didapat dari Badan Pusat Statistik (2024), jumlah pemberian kredit dari bank umum terhadap setiap sektor ekonomi begitu beragam. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, pada tahun 2022 terdapat beberapa sektor yang mengalami penurunan jumlah kredit bank, contohnya Pengadaan Listrik dan Gas serta Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah serta Daur Ulang yang tiap-tiap sektornya mengalami penurunan sebesar Rp155.000.000.000 dan Rp106.000.000.000. Sementara

itu, pada tahun 2023, sektor yang mengalami penurunan, yaitu Transportasi dan Pergudangan yang mengalami penurunan sebesar Rp206.000.000.000. Penurunan-penurunan tersebut terjadi pada sektor insentif yang merupakan sektor yang kegiatan usahanya akan berdampak langsung terhadap lingkungan.

**Tabel 1.2 Nilai Rata-Rata Utang Jangka Panjang dan Jangka Pendek per Perusahaan**

Company Name	Tahun	Rata-rata Utang Jangka Panjang dan Jangka Pendek (Rp)
PT Adhi Karya (Persero) Tbk.	2021	5.256.705.509.035
	2022	5.231.882.778.740
	2023	6.026.948.193.920
PT Adaro Energy Indonesia Tbk.	2021	11.452.247.625.000
	2022	12.316.934.712.500
	2023	11.070.561.044.000
PT Aneka Tambang Tbk.	2021	3.007.462.500.000
	2022	1.577.337.500.000
	2023	1.323.790.000.000
PT AirAsia Indonesia Tbk.	2021	2.872.229.592.195
	2022	3.359.893.158.780
	2023	3.879.999.895.444
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	2021	54.977.952.360.000
	2022	31.153.607.046.375
	2023	30.387.140.403.212
PT Vale Indonesia Tbk.	2021	44.624.855.000
	2022	66.360.147.500
	2023	120.160.012.000
PT Link Net Tbk.	2021	1.672.757.000.000
	2022	2.672.779.500.000

Company Name	Tahun	Rata-rata Utang Jangka
		Panjang dan Jangka Pendek (Rp)
	2023	3.437.517.000.000
	2021	2.691.854.212.500
PT Merdeka Copper Gold Tbk.	2022	10.987.614.603.900
	2023	12.094.037.870.712
	2021	523.625.500.000
PT Bukit Asam Tbk.	2022	681.100.500.000
	2023	650.841.000.000
	2021	4.593.478.000.000
PT United Tractors Tbk.	2022	1.501.083.500.000
	2023	9.290.308.000.000

Sumber: Data diolah penulis, 2025

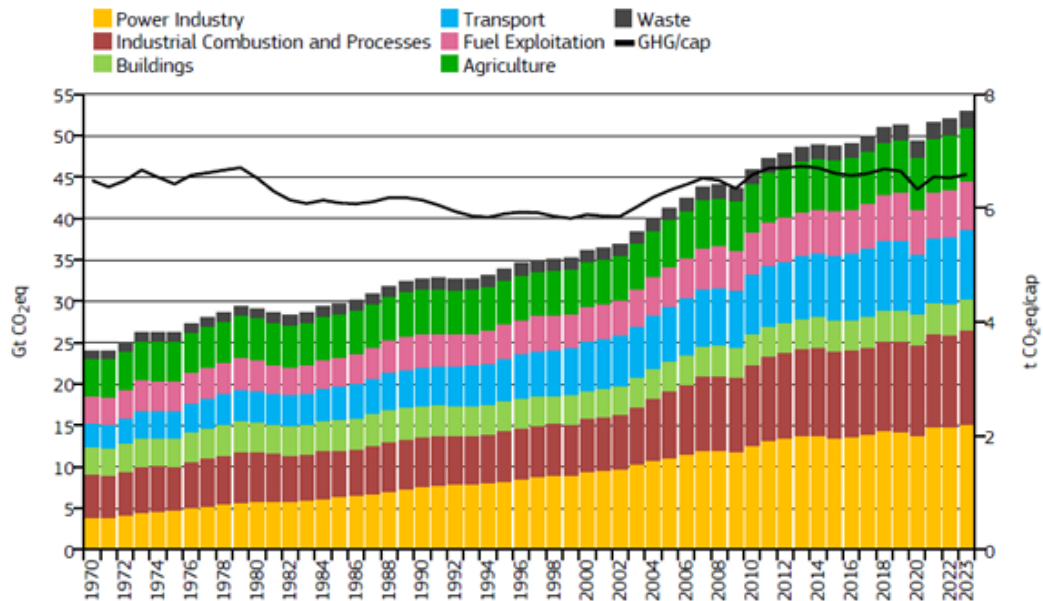
Berlandaskan tabel 1.2 tersebut, bisa ditinjau bahwasannya rata-rata tingkat utang jangka panjang serta jangka pendek di Indonesia masih berfluktuatif. Contohnya saja adalah pada PT Aneka Tambang Tbk dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, jumlah rata-rata utang jangka panjang dan jangka pendeknya mengalami penurunan setiap tahunnya dari tahun 2021 hingga 2022. Selain itu, pada PT Adaro Energy Indonesia Tbk serta PT Bukit Asam Tbk terlihat bahwa jumlah rata-rata utang jangka panjang dan jangka pendeknya berfluktuatif per tahunnya. Karena, pada tahun 2022, PT Adaro Energy Indonesia Tbk serta PT Bukit Asam Tbk mengalami peningkatan masing-masing sebesar Rp864.687.087.500 dan Rp157.475.000.000. Sedangkan, pada tahun 2023, PT Adaro Energy Indonesia Tbk serta PT Bukit Asam Tbk mengalami penurunan sebesar Rp1.246.373.668.500 dan Rp30.259.500.000. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan pada industri

insentif, mengalami permasalahan pada jumlah utang mereka yang membuat perusahaan mengalami penurunan pendanaan dari eksternal.

Gas rumah kaca telah menjadi pusat perhatian utama bagi para pelaku pasar modal. Gas rumah kaca (GRK) menjadi perhatian penting bagi pelaku pasar modal karena dampaknya terhadap lingkungan, regulasi, reputasi, dan kinerja keuangan perusahaan. Peningkatan emisi GRK berkontribusi pada perubahan iklim yang dapat mengganggu operasional bisnis, terutama di sektor-sektor yang rentan. Regulasi terkait emisi yang semakin ketat juga meningkatkan risiko hukum dan denda bagi perusahaan yang tidak mematuhi aturan. Selain itu, konsumen dan investor semakin memperhatikan praktik bisnis berkelanjutan, sehingga perusahaan yang berhasil mengurangi emisi lebih disukai dan memiliki reputasi yang lebih baik. Investor institusional pun kini memasukkan risiko terkait perubahan iklim dalam penilaian portofolio mereka. Pengelolaan emisi yang baik juga dapat meningkatkan efisiensi operasional dan profitabilitas, menjadikannya faktor penting dalam penilaian pasar modal terhadap prospek jangka panjang perusahaan. Peningkatan emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim menimbulkan berbagai risiko finansial yang besar bagi perusahaan, mulai dari kerugian aset fisik akibat bencana alam hingga gangguan operasional yang disebabkan oleh perubahan pola cuaca. Risiko-risiko ini dapat menghambat kinerja keuangan perusahaan. Selain itu, regulasi yang semakin ketat terkait emisi gas rumah kaca juga memaksa perusahaan untuk beradaptasi dan mengeluarkan biaya

tambahan. Emisi karbon adalah gas yang disebabkan adanya aktivitas pembakaran karbon (Rangga & Kristanto, 2023).

Salah satu penyebab terjadinya perubahan iklim karena adanya pemanasan global. Pemanasan global ini dapat disebabkan oleh aktivitas manusia yang menyebabkan suhu menjadi semakin meningkat. Berlandaskan “*Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)*”, suhu bumi dapat terus meningkat 4,2 derajat Celcius antara tahun 2050 hingga 2070 jika tidak terdapat langkah konkrit untuk memperlambat pemanasan global ini. Menurut Faizah (2022), Industri berkontribusi terhadap pemanasan global melalui aktivitas operasional perusahaan yang menghasilkan sejumlah besar limbah. Dalam setiap kegiatan operasional perusahaan, terutama perusahaan manufaktur, setiap mesin akan menggunakan bahan bakar fosil yang menghasilkan gas pembuangan. Gas tersebut akan mencemari udara sekitar dan menjadi gas rumah kaca. Gas rumah kaca atas kegiatan operasional perusahaan akan menyebabkan emisi karbon meningkat. Menurut Hardianti & Mulyani (2023), perkembangan dunia industri akan sejalan dengan perkembangan isu-isu pencemaran lingkungan, terutama emisi karbon. Gas rumah kaca yang memiliki pengaruh terbesar yaitu Carbon Dioxide (CO<sub>2</sub>), Metana (CH<sub>4</sub>), Nitrous Oxide (N<sub>2</sub>O), Hidrofluorokarbon (HFC), Perfluorokarbon (PFC), serta Sulfur Hexafluoride (SF<sub>6</sub>).



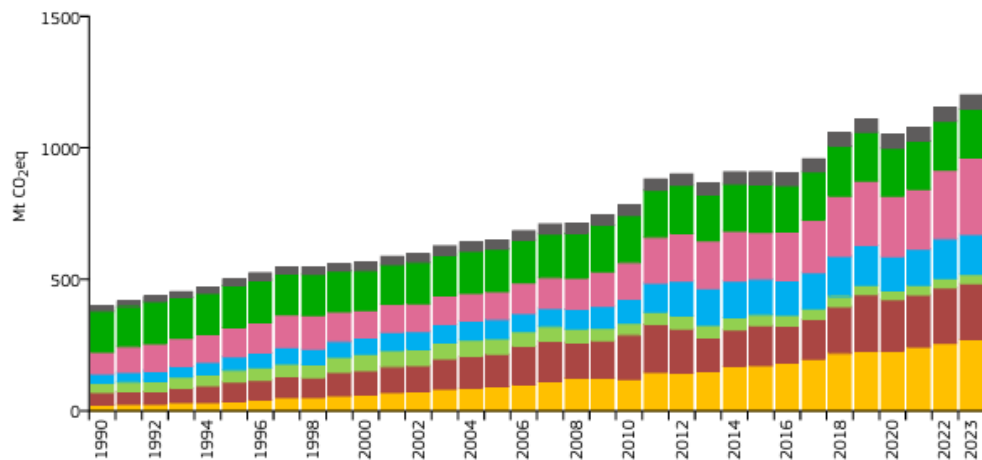
**Gambar 1.1 Grafik Emisi Gas Rumah Kaca secara Global, 1970-2023**

Sumber: JRC Science Report, 2024

Berdasarkan data yang terdapat di *Emissions Database for Global Atmospheric Research* (EDGAR), emisi karbon terus mengalami peningkatan dari tahun 1970 hingga 2023 dengan penyumbang terbesar berasal dari sektor energi. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, tren emisi karbon mengalami penurunan sebesar 3,7% pada tahun 2020, yang disebabkan oleh epidemi Covid-19. Emisi karbon mengalami penurunan karena tingkat aktivitas harian untuk sektor industri mengalami penurunan pula sebesar 35% yang diakibatkan oleh adanya pembatasan permintaan energi di seluruh dunia (Le Quéré et al., 2020). Setelah pandemi Covid-19 sudah mulai berkurang dan aktivitas operasional industri kembali normal, emisi karbon di tahun 2022 semakin meningkat hingga mencapai 2,3% lebih tinggi dari tahun 2019 dan 1,4% lebih tinggi dari tahun 2021.

Isu pemanasan global ini tentu saja menjadi topik yang perlu di diskusikan baik di Indonesia maupun seluruh dunia. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) sendiri telah mendirikan suatu konvensi kerjasama yang membahas mengenai isu perubahan iklim ini, yaitu “*United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)*”. UNFCCC bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. UNFCCC mencapai tujuan tersebut dengan menjaga stabilitas gas rumah kaca di atmosfer di tingkat yang tidaklah berdampak negatif terhadap iklim planet ini.

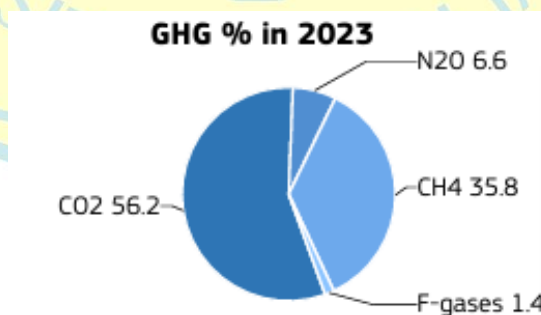
Sejalan dengan hal tersebut, UNFCCC membentuk suatu amandemen internasional, yang disebut Protokol Kyoto, guna mencegah perekonomian semakin mengalami dampak yang buruk akibat adanya perubahan iklim tersebut. Protokol Kyoto serta UNFCCC mempunyai korelasi erat karena Protokol Kyoto ialah bentuk penjabaran yang lebih detail serta spesifik atas tujuan UNFCCC (Hardianti & Mulyani, 2023). Sejak tahun 1997, Indonesia telah menjadi satu diantara negara yang mengadopsi Protokol Kyoto. Pada tahun 2015, Protokol Kyoto di perbaharui menjadi *Pari Agreement* yang bertujuan untuk menjaga komitmen negara – negara dalam menjaga kenaikan suhu global kurang dari 2°C, serta membatasi peningkatan suhu lebih lanjut menjadi 1,5°C di atas tingkat pra – industri.



**Gambar 1.2 Grafik Emisi Gas Rumah Kaca di Indonesia, 1970-2023**

Sumber: Sumber: JRC Science Report, 2024

Di Indonesia sendiri, emisi karbon masih menjadi sebuah persoalan yang harus cepat diatasi. Berdasarkan data yang terdapat di *Emissions Database for Global Atmospheric Research* (EDGAR), tingkatan emisi karbon di Indonesia mengalami tren peningkatan di tiap tahunnya dan mengalami penurunan di tahun 2020. Penurunan tersebut sesuai dengan munculnya epidemi Covid-19 yang membuat aktivitas operasional industri menjadi terbatas.



**Gambar 1.3 Komponen Gas Rumah Kaca di Indonesia Tahun 2023**

Sumber: JRC Science Report, 2024

Sementara itu pada tahun 2023, komponen gas rumah kaca di Indonesia terbesar adalah karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) dengan nilai sebesar 56,2%. Sedangkan, untuk Metana (CH<sub>4</sub>) menyumbang sebesar 35,8% dan Nitrous Oxide (N<sub>2</sub>) menjadi penyumbang ketiga terbesar, yaitu sebesar 6,6%. Gabungan gas Fluorin (F-gases) hanya menyumbang sebesar 1,4% gas rumah kaca di Indonesia.

Melalui “Undang-Undang No. 17 Tahun 2004”, Indonesia sudah meratifikasi Protokol Kyoto sebagai upaya Indonesia dalam melaksanakan pembangunan keberlanjutan dan upaya penurunan emisi karbon. Pemerintah memainkan peran penting dalam menekan emisi karbon dengan berpartisipasi pada Protokol Kyoto, sebagaimana tercantum di “UU No. 17 Tahun 2004” serta didukung oleh kebijakan yang tercantum dalam “Perpres No. 61 Tahun 2011 mengenai peran dan strategi pemerintah dalam mendorong angka emisi gas rumah kaca” (Rangga & Kristanto, 2023). Peraturan yang disahkan oleh Pemerintah Indonesia merupakan bentuk aksi nyata dalam mendukung kebijakan pengurangan emisi sebanyak 26% pada usaha sendiri atau pengurangan 41% pada tingkat kerjasama internasional (Asmeri et al., 2022).

Dalam regulasi-regulasi tersebut disebutkan bahwa menganjurkan setiap perusahaan atau industri untuk mengungkapkan emisi karbon sebagai bagian dari pertanggung jawaban perusahaan terhadap lingkungan. Oleh karena itu, menjadi kewajiban perusahaan untuk mengukur, mendokumentasikan, mengidentifikasi, dan melaporkan emisi karbon mereka (Rangga & Kristanto,

2023). Melalui pengungkapan emisi karbon, perusahaan berkontribusi dalam mendukung upaya pemerintah untuk mengendalikan emisi karbon.

*Carbon emission disclosure* dapat menunjukkan bagaimana perusahaan tidaklah sekedar memprioritaskan pengungkapan informasi finansial dan ekonomi, namun memberikan informasi secara jelas pula kepada publik, terutama dalam hal operasi industri.

Akuntansi ialah satu diantara sekian banyak bidang keilmuan yang memberikan perhatian kepada isu emisi gas rumah kaca yang semakin kompleks. Timbul kritik bahwa praktik akuntansi di suatu perusahaan dapat memicu terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global (Asmeri et al., 2022). Hal ini didasarkan karena perusahaan hanya berfokus pada transaksi keuangan yang material saja tanpa memerhatikan peristiwa lingkungan yang merupakan pilar dasar dalam proses bisnis.

Di Indonesia, perusahaan dengan emisi karbon tinggi menghadapi tantangan besar dalam mengakses kredit dari lembaga keuangan. Kebijakan perbankan yang semakin memperhatikan aspek keberlanjutan dan lingkungan membuat bank enggan memberikan kredit pada perusahaan yang berkontribusi besar terhadap kerusakan lingkungan atau tidak transparan dalam mengungkapkan emisi karbon.

Hal ini terdapat di “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 51/2017” yang sudah disahkan tanggal 20 Juli 2017. Peraturan ini mulai berlaku pada Januari 2019 bagi bank asing dan bank BUKU 4, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Central Asia (BCA), Bank Negara Indonesia (BNI),

dan Bank CIMB Niaga. Dengan menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan, aturan ini berupaya mendukung penuh industri jasa keuangan dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU OJK 51/2017. Sementara itu, pada pasal 2 dijelaskan bahwa keuangan berkelanjutan diwajibkan kepada lembaga jasa keuangan, emiten, serta perusahaan publik.

Beberapa bank besar di Indonesia bahkan telah secara terbuka berkomitmen untuk mendukung target "Net Zero" dan mengurangi pembiayaan kepada perusahaan dengan jejak karbon yang tinggi. Perusahaan yang gagal menurunkan emisi atau tidak mengadopsi praktik governance yang baik menghadapi risiko peningkatan biaya utang atau kesulitan mendapatkan kredit. Peraturan pemerintah seperti penetapan harga karbon juga semakin mendorong perusahaan untuk mengurangi emisi mereka guna mendapatkan keuntungan dalam perdagangan karbon, sehingga mempengaruhi keputusan kredit oleh bank-bank besar di Indonesia. Contohnya adalah PT Bank Mandiri Tbk yang per Maret 2023 sudah menyalurkan pembiayaan ke sejumlah sektor yang mengimplementasikan prinsip keberlanjutan lingkungan, keseimbangan sosial serta tata kelola usaha yang baik (ESG) sampai Rp232 triliun ataupun tumbuh 11 persen secara tahunan.

Berdasarkan hasil penelitian dari Kleimeier & Viehs (2016) dan Andanrani et al. (2024), menunjukkan bahwa *carbon emission disclosure* dipengaruhi secara positif oleh *cost of debts*. Hal ini menunjukkan bahwa *cost of debts* akan meningkat jika perusahaan bertanggungjawab atas emisi karbon

tersebut. Bentuk pertanggungjawabannya adalah dengan mengungkapkan emisi karbon perusahaan serta membayar bunga atas emisi tersebut. Sementara itu, dalam penelitian Hu & Liang (2024) dan Nasih et al. (2024) menunjukkan bahwa *carbon emission disclosure* dipengaruhi secara negatif oleh *cost of debt*. Dengan adanya *carbon emission disclosure*, perusahaan meminimalisir adanya informasi yang asimetris antara manajemen dan para pemangku kepentingan, serta membantu kreditor dalam memberikan sinyal positif untuk lebih yakin dalam memberikan pinjaman kepada perusahaan (Hu & Liang, 2024). Hal ini berarti jika terjadi kenaikan *carbon emission disclosure* akan mengakibatkan *cost of debt* menjadi rendah.

Satu diantara faktor keuangan terpenting yang diperhitungkan kreditor dan investor ketika menilai kinerja perusahaan adalah *profitability*. “*Return on Assets (ROA)*”, yang dihitung melalui pembagian laba bersih dengan total aset, ialah satu diantara metrik yang kerap dipergunakan. ROA yang rendah menandakan manajemen aset yang tak efektif, sedangkan ROA yang tinggi menandakan kapabilitas perusahaan dalam menggunakan aset untuk menciptakan laba (Pardosi & Sinabutar, 2019).

Dalam konteks *cost of debts*, *Profitability* yang diukur melalui ROA berperan penting. Kreditor cenderung melihat perusahaan dengan ROA tinggi sebagai risiko yang lebih rendah untuk gagal bayar, karena mereka memiliki arus kas yang lebih stabil dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban utang (Utami, 2021). Oleh karena itu, perusahaan dengan ROA tinggi sering kali mendapatkan pinjaman dengan biaya lebih rendah, baik dalam bentuk suku

bunga yang lebih rendah maupun syarat yang lebih menguntungkan (Pardosi & Sinabutar, 2019).

*Profitability* yang tinggi juga memengaruhi struktur modal perusahaan. Perusahaan dengan kemampuan menghasilkan keuntungan yang memadai cenderung mengandalkan pendanaan internal daripada utang, hal ini membantu dalam mengurangi *cost of debts* (Soebagyo & Iskandar, 2022). Sebaliknya, perusahaan dengan ROA rendah cenderung lebih bergantung pada utang, yang dapat mengurangi profitabilitas lebih lanjut akibat beban bunga yang lebih tinggi.

Dengan demikian, *Profitability* yang diukur melalui ROA memiliki dampak signifikan terhadap *cost of debts* Perusahaan dengan ROA tinggi memiliki akses lebih mudah ke pembiayaan dengan biaya yang lebih rendah, serta fleksibilitas dalam manajemen keuangan (Sherly & Fitria, 2019). Sebaliknya, perusahaan dengan ROA rendah menghadapi *cost of debts* yang lebih tinggi, yang dapat berdampak negatif pada kelangsungan usaha jangka panjang.

Hasil penelitian dari beberapa studi menunjukkan hasil yang tidak konsisten terkait pengaruh *profitability* terhadap *cost of debts*. Pardosi & Sinabutar (2019) dan Soebagyo & Iskandar (2022) mengindikasikan bahwa *profitability* dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh *cost of debts*. Sehingga, nilai *cost of debts* akan meningkat seiring dengan nilai *profitability* yang diperoleh perusahaan. Sementara, penelitian Utami (2021), Sherly & Fitria (2019), dan Muspyta & Ruslim (2021) mengungkapkan bahwa “*profitability*”

memiliki dampak negatif serta tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *cost of debts*, sehingga *profitability* tidak dapat meningkatkan nilai *cost of debts*.

*Corporate governance* merujuk pada sistem, prinsip, dan proses yang digunakan perusahaan untuk mengawasi dan mengelola operasi mereka (Sofiana et al., 2023). Tata kelola yang baik melibatkan transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme pengawasan yang efektif, bertujuan melindungi kepentingan pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham dan kreditor (Calen, 2019). Dalam konteks *cost of debts*, *corporate governance* yang baik memainkan peran krusial. Selain menilai kinerja keuangan perusahaan, kreditor juga melihat manajemen dan struktur organisasinya.

Beberapa elemen *corporate governance* yang memengaruhi persepsi kreditor terkait *cost of debts* mencakup keberadaan dewan komisaris yang independen, yang berfungsi sebagai pengawas utama manajemen perusahaan (Anam et al., 2021). Dewan komisaris yang independen meningkatkan kepercayaan kreditor bahwa keputusan perusahaan akan meminimalkan risiko finansial. Selain itu, transparansi dalam pelaporan keuangan sangat penting bagi kreditor yang memerlukan informasi akurat untuk menilai risiko. Perusahaan dengan *corporate governance* yang baik cenderung menyusun laporan keuangan sesuai standar tinggi, mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya, dan memberikan informasi yang cukup tentang risiko yang dihadapi (Sofiana et al., 2023).

Menurut penelitian Sofiana et al. (2023), tidak ada hubungan negatif antara “*cost of debt*” dengan proporsi dewan komisaris independen. Hal ini

mengindikasikan bahwa *cost of debt* akan meningkat seiring dengan bertambahnya proporsi dewan komisaris independen. Sementara itu, riset yang dilakukan Anam et al. (2021), Calen (2019), Musrifa (2021), dan Yani & Indriani (2022) menunjukkan proporsi dewan komisaris independen dipengaruhi secara negatif oleh “*cost of debt*”. Sehingga, kenaikan atau penurunan nilai *cost of debts* tidak dipengaruhi oleh proporsi dewan komisaris di suatu perusahaan.

Struktur kepemilikan yang jelas juga berkontribusi pada *corporate governance* yang baik. Kreditor akan memperhatikan pengaturan kepemilikan perusahaan, menghindari potensi konflik kepentingan yang bisa mempengaruhi keputusan bisnis (Sofiana et al., 2023). Struktur yang teratur memberikan keyakinan kepada kreditor bahwa perusahaan dijalankan secara baik dan menghindari risiko keuangan yang tidak perlu, sehingga dapat menekan *cost of debts*.

Salah satu komponen penting dalam *corporate governance* perusahaan yakni kepemilikan institusional, yang merujuk pada proporsi saham perusahaan yang dimiliki organisasi ataupun korporasi lain (Sofiana et al., 2023). Kepemilikan institusional berperan signifikan dalam meningkatkan keterlibatan pihak institusi dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen dan kinerja perusahaan (Anam et al., 2021). Tingginya tingkat kepemilikan institusional memungkinkan pengawasan yang lebih ketat, sehingga mengurangi potensi terjadinya penyimpangan dalam manajemen (Nisa & Wulandari, 2021).

Pengawasan yang efektif dari institusi juga berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik sekaligus mengurangi keraguan kreditor terhadap stabilitas dan kinerja keuangan perusahaan. Institusi yang terlibat biasanya memiliki keahlian khusus dalam analisis risiko dan investasi, seperti bank, reksa dana, dan perusahaan asuransi. Dengan keahlian tersebut, institusi tersebut dapat memonitor kinerja manajemen dan memastikan bahwa keputusan bisnis selaras dengan sasaran organisasi. Kehadiran institusi ini juga memberikan dorongan kepada manajemen untuk lebih transparan, akuntabel, dan efisien dalam menjalankan operasional perusahaan.

Berdasarkan penelitian dari Sofiana et al. (2023), Anam et al. (2021), dan Sherly & Fitria, (2019) menunjukkan bahwa “*corporate governance*” yang diukur melalui kepemilikan institusional dipengaruhi secara positif oleh *cost of debts*. Sedangkan, penelitian dari Soebagyo & Iskandar (2022), Calen (2019), Nisa & Wulandari (2021), dan Yani & Indriani (2022) mengungkapkan bahwasannya kepemilikan institusional dipengaruhi secara negatif serta signifikan oleh *cost of debts*. Sehingga, kenaikan atau penurunan nilai *cost of debts* tidak dipengaruhi oleh jumlah kepemilikan institusional di suatu perusahaan.

Dengan demikian, berdasarkan fenomena yang sudah dijelaskan sebelumnya, peneliti melihat adanya gap yang kontradiksi antara “*carbon emission disclosure, profitability, dan good corporate governance*” terhadap “*cost of debts*”. Selain itu, di era perubahan iklim ini, peneliti hendak mencari tahu apakah perusahaan yang telah melaksanakan pengungkapan emisi karbon

masih dapat mempertahankan nilai *cost of debt* jika diimbangi dengan *profitability* dan *corporate governance* yang baik. Sehingga, peneliti melaksanakan penelitian yang berjudul “**Pengaruh Carbon Emission Disclosure, Profitability, dan Corporate Governance terhadap Cost of Debts**”.

## 1.2 Pertanyaan Penelitian

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah menganalisis pengaruh “*carbon emission disclosure, profitability, dan corporate governance*” terhadap “*cost of debts*”. Namun, penelitian yang membahas keempat variabel tersebut masih minim. Selain itu, terdapat beberapa penelitian yang memberikan hasil yang berlawanan dengan penelitian terdahulu lainnya. Oleh karena itu, penulis dapat merumuskan pertanyaan penelitian terkait *carbon emission disclosure, profitability, dan corporate governance* terhadap pengaruhnya dalam membuktikan tingkat *cost of debts*, meliputi:

1. Apakah *carbon emission disclosure* berpengaruh terhadap *cost of debts*?
2. Apakah *profitability* berpengaruh terhadap *cost of debts*?
3. Apakah *corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional dapat berpengaruh terhadap *cost of debts*?
4. Apakah *corporate governance* yang diproksikan dengan proporsi dewan komisaris independen dapat berpengaruh terhadap *cost of debts*?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan pertanyaan penelitian yang sudah dirumuskan tersebut, maka tujuan penelitian ini mencakup:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh *carbon emission disclosure* terhadap *cost of debts*.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh *profitability* terhadap *cost of debts*.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh *corporate governance* yang diprosikan dengan kepemilikan institusional terhadap *cost of debt*.
4. Menguji dan menganalisis pengaruh *corporate governance* yang diprosikan dengan proporsi dewan komisaris independen terhadap *cost of debt*.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian pada penelitian dapat dibagi menjadi manfaat teoritis serta manfaat praktis dengan uraian seperti dibawah:

#### 1.4.1 Manfaat Teoretis

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas pengetahuan serta dijadikan referensi yang bermanfaat di bidang keuangan, terutama yang berkaitan dengan pengaruh “*carbon emission disclosure, profitability, dan corporate governance*” terhadap “*cost of debts*”.
2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu mendorong perkembangan teori agensi juga praktik manajemen yang berkelanjutan guna

merancang strategi yang lebih efektif dalam mengelola biaya utang di perusahaan.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada perusahaan yang tercantum di BEI terkait pentingnya pengaruh “*carbon emission disclosure, profitability, dan corporate governance*” kepada “*cost of debts*”.
2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan rujukan oleh perusahaan dalam memperbaiki tingkatan *cost of debts* dengan caea memperhatikan pengaruh dari *carbon emission disclosure, profitability, dan corporate governance*.

